



LAPORAN

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI
KE KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024-2025**

**DALAM RANGKA PENGAWASAN TERHADAP
PELAKSANAAN BULAN IMUNISASI ANAK
SEKOLAH (BIAS) TAHUN 2024**

TANGGAL 19 S.D. 21 SEPTEMBER 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, SEPTEMBER 2024**



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI
PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN BULAN
IMUNISASI ANAK SEKOLAH (BIAS) 2024
KE KABUPATEN BOGOR
19 SEPTEMBER – 21 SEPTEMBER 2024

A. PENDAHULUAN

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam program prioritas tahun 2024 tetap melanjutkan kebijakan yang telah dilakukan pada tahun 2023, salah satunya yaitu pada layanan primer, yaitu terus meningkatkan cakupan dan perluasan imunisasi rutin menjadi 14 jenis vaksin. Kebijakan ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang kesehatan terutama bagi anak-anak usia sekolah.

Upaya tersebut sering kita dengar sebagai Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan peserta didik dari jenjang pendidikan TK sampai dengan Sekolah Menengah Atas. Dalam Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (pada saat itu), Menteri Kesehatan RI, Menteri Agama RI, dan Menteri Dalam Negeri RI Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah. UKS merupakan wadah dan program untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan sedini mungkin yang dilakukan secara terpadu.

Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) sebagai bagian dari UKS dicanangkan sebagai waktu dilaksanakan pemberian imunisasi lanjutan bagi anak usia sekolah dasar dengan sasaran peserta didik kelas 1,2, 5 dan 6 SD atau bentuk lain yang sederajat serta anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Pemberian imunisasi ini dilakukan setiap tahunnya pada bulan Agustus untuk imunisasi Campak Rubela dan bulan November untuk imunisasi Dt (*Difteria Tetanus*) dan Td (*Tetanus Difteria*).

Dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan BIAS tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, disebutkan bahwa tujuan kegiatan ini adalah agar anak usia sekolah terhindar dari penyakit Campak, Rubela, Tetanus, Difteri dan Kanker leher rahim melalui pemberian imunisasi, atau secara khususnya bertujuan untuk:

1. meningkatkan kekebalan anak usia sekolah terhadap penyakit Campak, Rubela, Tetanus, dan Difteri;

2. memberikan kekebalan bagi anak perempuan usia sekolah terhadap penyakit Kanker leher rahim; dan
3. menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit Campak, Rubela, Tetanus, Difteri, dan Kanker leher rahim.

Kementerian Kesehatan dalam upaya peningkatan cakupan imunisasi ini selain menambahkan jenis vaksin imunisasi menjadi 14 vaksin, juga melakukan digitalisasi data imunisasi sehingga tidak ada lagi pencatatan manual, semua data terintegrasi ke Satu Sehat karena sudah di masukkan melalui Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK).

Dalam pelaksanaannya, dari tahun ke tahun tetap terdapat tantangan, antara lain:

1. Masih adanya persepsi negatif dari masyarakat terhadap imunisasi rutin, seperti banyaknya rumor tentang imunisasi yang tidak aman, vaksin tidak berkualitas yang menyebabkan autisme serta penyakit lain.
2. Kesadaran dan pemahaman masyarakat yang kurang tentang pentingnya imunisasi.
3. Keterbatasan sumber daya manusia kesehatan dalam pelaksanaan imunisasi.
4. Kapasitas dan pengelolaan rantai dingin.

Berdasarkan uraian di atas, maka Komisi IX DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik terkait pengawasan pelaksanaan BIAS tahun 2024 di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

B. LANDASAN

1. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Pasal 59 ayat (4) huruf d, serta ayat (5) huruf f, serta Pasal 60 ayat (3) huruf f tentang Kunjungan Kerja Spesifik.
2. Keputusan Pimpinan DPR-RI tentang Penugasan kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI untuk melakukan kunjungan kerja dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024- 2025.
3. Keputusan Rapat Internal Komisi IX DPR RI, tanggal 26 Agustus 2024.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah:

1. Mendapatkan hasil pelaksanaan BIAS 2024 yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Bogor.
2. Mendapatkan masukan apabila terdapat kekurangan serta kendala yang dihadapi pada saat BIAS ini dilakukan.

D. KELUARAN

Keluaran dari Kunjungan Kerja ini adalah untuk mendapatkan laporan tentang hasil serta kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan BIAS Tahun 2024 di Kabupaten Bogor. Hasil dari kunjungan kerja spesifik ini akan ditindaklanjuti dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan RI untuk peningkatan pelaksanaan BIAS pada tahun-tahun berikutnya.

E. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Tim Kunker Spesifik Komisi IX DPR RI melakukan pertemuan bersama:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
2. POKJA KIPI Kabupaten Bogor.
3. APKESMI Kabupaten Bogor

Pendamping dari mitra Komisi IX DPR RI:

Kementerian Kesehatan RI

F. DAFTAR NAMA TIM KUNJUNGAN KERJA

NO.	NO. ANGG	N A M A	JABATAN	FRAKSI	DAPII
1.	A-35	Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A.	KETUA TIM / WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI	PKB	JATIM III
2.	A-222	H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H.	ANGGOTA	PDIP	JATIM IX
3.	A-149	Dra. ELVA HARTATI, S.IP., M.M.	ANGGOTA	PDIP	BENGKULU
4.	A-182	Dr. H. EDY WURYANTO, S.KP., M.Kep.	ANGGOTA	PDIP	JATENG III
5.	A-269	DELIA PRATIWI SITEPU, S.H.	ANGGOTA	GOLKAR	SUMUT III
6.	A-271	Drs. H. DARUL SISKI	ANGGOTA	GOLKAR	SUMBAR I
7.	A-91	Dr. Ir. H. KARDAYA WARNIKA, D.E.A.	ANGGOTA	GERINDR A	JABAR VIII
8.	A-134	Dra. Hj. RUSKATI ALI BAAL	ANGGOTA	GERINDR A	SULBAR
9.	A-364	MUHAMMAD FARHAN, S.E.	ANGGOTA	NASDEM	JAWA BARAT I
10.	A-27	Hj. NUR NADLIFAH, S.Ag., M.M.	ANGGOTA	PKB	JATENG IX
11.	A-30	H. SUKAMATO, S.H.	ANGGOTA	PKB	D.I.Y.
12.	A-436	Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.	ANGGOTA	PKS	JABAR VIII
13.	A-494	DIAN ISTIQOMAH, S.Kep.	ANGGOTA	PAN	DKI JKT III

G. WAKTU PELAKSANAAN

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kabupaten Bogor dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 21 September 2024.

H. HASIL KUNJUNGAN

1. Dalam Pelaksanaan BIAS di Kabupaten Bogor, dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu:
 - a. persiapan, berupa sosialisasi, penghitungan kebutuhan vaksin sekaligus pengajuan kebutuhan vaksin ke provinsi, pendataan sasaran anak usia sekolah yang dilakukan oleh puskesmas, dan sampai pada distribusi vaksin;
 - b. pelaksanaan, berupa pengelolaan rantai dingin, identifikasi dan riwayat imunisasi bagi peserta didik, skrining dan memastikan sasaran penerima sesuai dengan usia, jenis antigen serta jadwalnya, serta pengelolaan limbah imunisasi, dan
 - c. pencatatan dan pelaporan, berupa penginputan hasil pelaksanaan BIAS kedalam aplikasi ASIK *mobile* sekaligus pelaporan hasil pelaksanaan BIAS ke dinas kesehatan.
2. Untuk cakupan BIAN tahun 2024, apabila melihat tahun sebelumnya tahun ini cakupannya lebih baik diatas 90%.

CAKUPAN BIAS TAHUN 2023 & 2024									
JENIS IMUNISASI	TAHUN 2023				TAHUN 2024				KETERANGAN
	TARGET	SASARAN (PUSDATIN)	CAKUPAN		TARGET	SASARAN (PUSDATIN)	CAKUPAN		
			ABSOLUT	%			ABSOLUT	%	
MR KELAS 1	95%	107.400	100.435	93,51%	95%	93.215	87.716	94,10%	
HPV DOSIS 1	95%	54.546	44.224	81,08%	95%	44.778	40.300	90%	
HPV DOSIS 2					95%	44.224	35.822	81%	
DT KELAS 1	95%	107.400	101.140	94,17%					
Td KELAS 2	95%	108.133	100.138	92,61%					
Td KELAS 5	95%	111.525	95.115	85,29%					

3. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) selalu menjadi perhatian yang serius bagi Kabupaten Bogor, mengingat masih ada kasus yang terjadi setelah/pasca imunisasi dilakukan.

DATA KIPI TAHUN 2023 & 2024

DATA KIPI 2023

No.	Umur	Vaksin	Kondisi Terakhir	Kreteria KIPI		Hasil Audit	Keterangan
				Serius	Non Serius		
1	3 Bulan 5 hari	PCV 1	dirawat (pulang sehat)	serius		koinsiden	
2	4 bulan 23 hari	DPT 3, Polio 4	dirawat (pulang sehat)	serius		koinsiden	
3	7 bulan 25 hari	DPT 1, Polio 2, PCV 1	dirawat (pulang sehat)	serius		koinsiden	
4	7 tahun	Td	rawat jalan		non serius	koinsiden	BIAS
5	10 tahun	HPV	rawat jalan		non serius	koinsiden	BIAS

DATA KIPI 2024

No.	Umur	Vaksin	Kondisi Terakhir	Kreteria KIPI		Hasil Audit	Keterangan
				Serius	Non Serius		
1	2 bulan 3 hari	DPT 1, PCV 1, Polio 2	dirawat (pulang sehat)	serius		koinsiden	
2	9 bulan 10 hari	MR 1	dirawat (pulang sehat)	serius		koinsiden	
3	5 bulan 12 hari	DPT 1, OPV 2, PCV 1	Meninggal	serius		koinsiden	
4	2 tahun 1 bulan	DPT 4, MR 2	dirawat (pulang sehat)	serius		koinsiden	

4. Terkait dengan stok vaksin di Kabupaten Bogor, selama ini masih cukup dan tidak ada masalah, dan permintaan sudah sesuai dengan permintaan yang diajukan.

Stok Vaksin Sampai Dengan Bulan Juli 2024

Jenis Vaksin	Stok (Vial)	Kebutuhan BIAS bulan Agustus		kekurangan vaksin (vial)	keterangan
		sasaran	vial		
MR	15.310	93.215	11.652	0	pelaksanaan agustus
HPV	90.682	89.002	89.002	0	pelaksanaan agustus
DT	754	93.747	9.375	8.621	pelaksanaan november, pengajuan vaksin september
Td	13.810	185.615	18.562	4.752	pelaksanaan november, pengajuan vaksin september

5. Masih terdapat kendala dalam pelaksanaan BIAS di Kabupaten Bogor, yaitu;
- walaupun sudah baik dalam cakupan, namun masih belum memenuhi target;
 - sulitnya pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah;
 - masih ada sekolah yang menolak pelaksanaan BIAS;
 - masih belum optimalnya dukungan lintas sektor;
 - masih kurangnya pemahaman orang tua terkait pentingnya imunisasi serta adanya berita hoax dan kekhawatiran terhadap dampak vaksin; dan
 - pembiayaan kasus KIPI, walau untuk saat ini, biaya kasus KIPI menggunakan dana jamkesda sesuai Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja ASN Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

I. REKOMENDASI

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk melibatkan semua *stakeholder*, termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam meningkatkan cakupan peserta imunisasi dalam pelaksanaan BIAS ini melalui:
 - a. peningkatan pendataan anak usia sekolah yang tidak bersekolah sehingga mereka bisa berpartisipasi dalam program BIAS;
 - b. pendekatan kepada sekolah dan orang tua yang masih menolak untuk anak mereka diberikan imunisasi.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk bekerjasama dengan Komnas KIPI guna memberikan perhatian serius kepada anak peserta imunisasi yang mengalami KIPI agar bisa tertangani dengan baik sehingga tidak sampai berakibat fatal.

J. PENUTUP

Demikian laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kabupaten Bogor disampaikan. Atas segala bantuan dan kerja sama yang baik dari mitra kerja Komisi IX DPR RI, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Instansi terkait serta khususnya masyarakat setempat yang telah membantu kelancaran selama Kunjungan Kerja ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 19 September 2024

**TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI
KE KABUPATEN BOGOR
KETUA TIM**

ttd.

Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A.

A-35